

Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

* Deni Sukmawan¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : denisukmawan@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jalan lintas provinsi di Rokan Hulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sejalan dengan makna yang terkandung dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum serta perumahan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi William N. Dunn, yang memiliki indikator meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala seksi bidang bina marga dan kepala seksi UPT, serta wawancara dengan pengendara untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 belum sepenuhnya optimal dalam hal responsivitas dan ketepatan. Meskipun kinerja ini sudah cukup baik, namun dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran, peningkatan kualitas jalan, pengawasan yang lebih baik, serta pemerataan dalam pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci: Evaluasi kinerja, Dinas PUPRPKPP, Infrastruktur Jalan.

Abstract

This study was conducted with the aim of evaluating the performance of the Riau Province PUPRPKPP Office in implementing the repair and construction of inter-provincial roads in Rokan Hulu. This aims to determine whether the performance of the Riau Province PUPRPKPP Office is in line with the meaning contained in the Minister of PUPR Regulation Number 6 of 2022 concerning the planning and programming of public works infrastructure and public housing. The method used in this study is descriptive qualitative and analyzed using a descriptive approach. The theory applied in this study is William N. Dunn's evaluation theory, which has indicators including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and accuracy. Data were collected through interviews with the head of the highway section and the head of the UPT section, as well as interviews with drivers to obtain different perspectives. The results of the study indicate that the performance of the Riau Province Public Works, Spatial Planning, Housing, Residential Areas, and Land Office in the development of provincial road infrastructure in Rokan Hulu Regency in 2025 is not fully optimal in terms of responsiveness and accuracy. Although this performance is quite good, there are still shortcomings in the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, and equity that need to be improved. Therefore, it is necessary to increase institutional capacity, budget allocation, improve road quality, better supervision, and equalize the development and repair of inter-provincial roads in Rokan Hulu Regency.

Keywords: Performance evaluation, PUPRPKPP Service, Road Infrastructure.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur adalah pilar penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan jembatan, berfungsi vital dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperlancar akses layanan publik. Jalan, sebagai infrastruktur krusial, menghubungkan wilayah dan menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Jalan yang baik dapat mengurangi kemacetan ekonomi dan mendorong pertumbuhan, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat hubungan antar daerah. Investasi dalam pembangunan jalan bukan hanya proyek fisik, tetapi langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.

Namun, banyak daerah masih menghadapi masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, agar dapat mendukung daerah produksi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Evaluasi kinerja Dinas PUPR penting untuk menilai efektivitas program perbaikan jalan, terutama di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi ekonomi besar namun terkendala infrastruktur yang kurang memadai.

Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas 7.588,13 km², memiliki peluang di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, kerusakan jalan akibat kendaraan berat, terutama truk, mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan lintas provinsi yang menghubungkan Riau dan Sumatera Utara memiliki panjang 438,66 km, sehingga penting untuk menjaga kondisinya agar tidak mengganggu konektivitas antar daerah.

Kondisi jalan di Rokan Hulu masih banyak yang rusak, seperti lubang dan permukaan bergelombang, yang menghambat lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kerusakan ini diperburuk oleh kurangnya perawatan dan perbaikan rutin. Masyarakat, terutama petani, kesulitan mendistribusikan hasil produksi, yang berdampak negatif pada perekonomian daerah. Beberapa daerah di Rokan Hulu, seperti Kecamatan Rambah dan Ujung Batu, mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Penyebabnya bervariasi, termasuk kualitas aspal yang rendah dan dampak kendaraan berat. Meskipun Rokan Hulu memiliki jalan provinsi terpanjang, wilayah ini tidak memiliki status jalan nasional, yang membuat peran jalan provinsi semakin penting. Fokus pembangunan di Rokan Hulu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang baik. Dengan jalan yang memadai, diharapkan dapat menarik investasi dan pariwisata, serta meningkatkan pergerakan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk Menilai Kinerja Dinas PUPR/PPKPP dalam Pelaksanaan Perbaikan dan pembangunan jalan lintas provinsi rokan hulu. apakah sesuai makna dengan Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merencanakan proyek pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menevaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Di Kabupaten Rokan Hulu,. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks evaluasi kinerja dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat. Menurut (Moleong, 2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dari fenomena sosial yang kompleks, sehingga sangat

cocok untuk menganalisis kinerja pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat daerah

Seperti yang sudah diketahui penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survei yang turun ke lapangan yang merupakan salah satu kategori penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks sosial. Metode ini dibuat untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi terhadap suatu fenomena atau realitas sosial yang ada, dengan cara mendeskripsikan berbagai variabel yang terkait dengan masalah serta unit yang sedang diteliti, termasuk fenomena-fenomena yang sedang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek yang relevan dengan isu yang diangkat oleh sebab itu penelitian yang mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Di Kabupaten Rokan Hulu, sangatlah cocok untuk menggunakan metode penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kinerja, menurut William N. Dunn, adalah proses penting dalam pengelolaan kebijakan, program, dan organisasi. Ini lebih dari sekadar penilaian; melainkan langkah strategis untuk mengukur efektivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di tengah kompleksitas saat ini, evaluasi kinerja menjadi alat vital untuk memastikan bahwa tindakan dalam pelaksanaan kebijakan atau program tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tujuan utama dari evaluasi kinerja mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Dalam analisis kebijakan publik, penilaian kinerja membantu pengambil keputusan untuk menilai kesesuaian hasil dengan ekspektasi. Misalnya, dalam kebijakan pengurangan kemiskinan, evaluasi ini memberikan wawasan tentang dampak program. Jika hasilnya tidak signifikan, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan untuk menghentikan atau merevisi program demi hasil yang lebih baik.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja merupakan proses krusial dalam manajemen kebijakan dan program. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas, evaluasi ini memberikan umpan balik berharga bagi pengambil keputusan. Melalui analisis mendalam dan penggunaan data yang tepat, evaluasi kinerja membantu memahami hasil yang dicapai dan memberikan panduan untuk perbaikan di masa depan. Dalam konteks yang terus berubah, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Teori Dunn relevan dalam konteks Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025. Indikator yang diterapkan dalam teori ini memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa efektif, efisien, dan responsif proses penilaian dilaksanakan. Semua aspek ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini tidak hanya menyediakan kerangka kerja evaluasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diharapkan dalam Dinas PUPRPKPP Riau. Indikator dalam teori ini berfungsi sebagai alat ukur kritis untuk menilai dan memperbaiki praktik yang ada, sehingga mencapai hasil optimal dalam pengembangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap penelitian dengan mengacu pada indikator-indikator berikut.

1. Efektivitas

Indikator efektivitas ini mencakup pertanyaan mengenai pencapaian tujuan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang, serta mengatasi

hambatan untuk mencapai hasil optimal dan berkualitas. Indikator ini menilai apakah sasaran pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dinas PUPRPKPP telah tercapai. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025.

Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk menilai pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas PUPRPKPP berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan dalam aspek legalitas, teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan sesuai pedoman yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif Dinas PUPRPKPP Riau dan pengguna jalan untuk memahami apakah kinerja dinas tersebut telah meningkat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, penulis sampai pada suatu kesimpulan bahwa indikator efektivitas yang dinilai menunjukkan kinerja yang sedikit kurang memuaskan. Meskipun Dinas PUPRPKPP telah berupaya semaksimal mungkin dengan meluncurkan berbagai program dan inisiatif lainnya, terdapat beberapa kendala yang menghambat, seperti keterbatasan anggaran dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Hal ini berdampak pada efektivitas kinerja Dinas PUPRPKPP, sehingga masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas PUPRPKPP untuk meningkatkan kualitas jalan serta memperbaiki sistem pengawasan agar kinerja yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada jalan lintas provinsi, terutama dengan adanya pembangunan jalan beton. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan yang ada ke depannya akan semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi mencakup pertanyaan utama terkait dengan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya, seperti waktu, biaya, dan tenaga, yang digunakan oleh Dinas PUPRPKPP dalam menjalankan pembangunan dan perbaikan jalan. Indikator ini juga akan mengungkapkan sejauh mana efisiensi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini berfungsi untuk menganalisis pelaksanaan kinerja Dinas PUPRPKPP sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar data dapat terkumpul untuk penelitian Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan proyek oleh Dinas PUPRPKPP dan UPT-nya kurang optimal. Meskipun ada upaya untuk mengutamakan proyek di jalan yang rusak, kondisi jalan cepat memburuk akibat volume kendaraan yang tinggi, terutama yang melebihi kapasitas. Kerusakan terjadi segera setelah perbaikan, menunjukkan bahwa strategi prioritas belum efektif. Selain itu, tantangan dalam mengelola anggaran tanpa mengorbankan kualitas juga menjadi masalah, di mana proyek dengan dana terbatas seringkali mengabaikan standar kualitas, menambah beban biaya perawatan di masa depan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya pemborosan waktu akibat kurangnya pengawasan. Progres perbaikan sering lambat, dengan proyek yang seharusnya selesai dalam tiga bulan sering melewati batas waktu, mengganggu kenyamanan pengguna

jalan. Ini menciptakan siklus merugikan, di mana jalan yang diperbaiki kembali rusak, menambah beban kerja Dinas PUPRPKPP dan UPT. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap strategi efisiensi sangat diperlukan, termasuk peningkatan pengawasan dan penyesuaian anggaran yang realistis untuk menjaga kualitas perbaikan jalan. Kesimpulannya, untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan prioritas, kualitas, dan pengawasan yang ketat.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan berfokus pada ketersediaan sumber daya, kualitas infrastruktur, dan distribusi yang adil serta merata untuk Dinas PUPRPKPP dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Indikator ini juga menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan serta pengamatan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator kecukupan dalam hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPRPKPP di Provinsi Riau masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Rokan Hulu. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur dan jalan yang masih belum memadai dan bahkan terdapat sejumlah jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, termasuk di jalan-jalan utama. Situasi ini menjadi sumber keluhan yang cukup signifikan dari masyarakat setempat. Meskipun pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan di beberapa daerah di Rokan Hulu, hasil yang dicapai belum dapat dirasakan secara maksimal di seluruh wilayah. Upaya perbaikan tersebut terhambat oleh keterbatasan anggaran yang tersedia serta adanya banyak kendaraan besar yang beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Rokan Hulu.

4. Pemerataan

Indikator pemerataan berfokus pada keadilan dan distribusi sumber daya, anggaran, serta infrastruktur oleh Dinas PUPRPKPP dalam pembangunan dan perbaikan jalan di Rokan Hulu. Indikator ini menilai apakah akses infrastruktur sudah merata, terutama di daerah terpencil, serta menganalisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung, penulis menyimpulkan bahwa indikator pemerataan infrastruktur jalan di daerah tersebut belum sepenuhnya tercapai. Meskipun terdapat sejumlah jalan yang telah mengalami peningkatan kualitas dengan perbaikan menjadi jalan beton, kenyataannya masih banyak jalan yang dalam kondisi sangat rusak dan membutuhkan perhatian lebih. Hal ini disebabkan oleh penggunaan skala prioritas dalam program pembangunan yang diterapkan oleh Dinas PUPRPKPP. Akibatnya, proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak merata di seluruh wilayah. Selain itu, meskipun Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah mengadopsi pendekatan perencanaan yang melibatkan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), masih terdapat banyak kalangan masyarakat yang merasa belum mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan tersebut. Dengan demikian, terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Responsivitas

Indikator responsivitas menilai bagaimana Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menangani aduan masyarakat terkait pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi. Ini termasuk evaluasi kinerja dinas dalam proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025. Indikator ini juga menggambarkan cara dinas menyusun program aduan dan merespons laporan untuk meningkatkan kinerja, serta menganalisis efektivitas evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator responsivitas yang ada dinilai cukup baik, meskipun terdapat perbedaan dalam penanganan antara berbagai kalangan masyarakat. Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menunjukkan kinerja yang lebih cepat dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur jalan di daerah perkotaan yang lebih besar. Namun, di sisi lain, alokasi anggaran yang terbatas membuat respons terhadap jalan-jalan di daerah terpencil menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, dapat dilihat adanya perkembangan positif dalam hal responsivitas dari Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, yang kini mulai merespon keluhan masyarakat dari berbagai daerah dan menunjukkan peningkatan dalam jumlah perbaikan yang dilakukan.

Dengan demikian, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan responsivitas, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Respons yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat di daerah perkotaan harus diimbangi dengan perhatian yang lebih besar terhadap daerah-daerah terpencil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi Dinas PUPRPKPP untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi mereka dalam menangani isu-isu infrastruktur agar dapat mencapai hasil yang lebih merata dan memuaskan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan berfokus pada pertanyaan utama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan. Analisis ini sangat penting dalam Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025. Keberadaan indikator ini mendukung perencanaan pembangunan yang tepat dan sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman infrastruktur.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator ketepatan sudah cukup baik, karena kebijakan ini sangat diperlukan dan menjadi kewajiban dalam ilmu pemerintahan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Selain itu, Dinas PUPRPKPP yang didukung oleh UPT telah menyiapkan berbagai program untuk pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun demikian, kinerja pada indikator ini belum sepenuhnya optimal, karena kebijakan tersebut belum merata dan cukup untuk masyarakat. Banyak jalan yang cepat rusak dan terdapat banyak ruas jalan yang berlubang, yang mengganggu aktivitas serta keselamatan pengendara. Oleh karena itu, di masa depan, diharapkan kebijakan ini dapat diperkuat dan diperluas agar dapat merata di semua jalur lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam proses Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025. Faktor-faktor tersebut mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi evaluasi, sehingga perlu diperhatikan secara seksama untuk meningkatkan kinerja dan hasil dari proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Dengan memahami kendala-kendala ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik di daerah tersebut.

1. Perubahan Iklim Dan Kondisi Geografis, Curah hujan yang tinggi dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kondisi tanah yang tidak stabil dan sistem drainase yang buruk memperburuk keadaan. Di Kabupaten Rokan Hulu, faktor geologis yang menghambat pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi meliputi ketidakstabilan tanah, topografi berbukit yang memerlukan penanganan lereng, potensi gempa, risiko erosi dan sedimentasi akibat hujan, masalah drainase karena tanah impermeabel, serta kurangnya bahan konstruksi berkualitas.
2. Anggaran yang terbatas, Keterbatasan anggaran APBD menjadi tantangan besar dalam perbaikan infrastruktur jalan. Meskipun Divisi Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau telah menunjukkan kinerja baik, perbaikan pasca bencana seperti banjir dan tanah longsor sangat bergantung pada anggaran tanggap darurat. Saat ini, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp5 miliar, dan ada kemungkinan anggaran ini dapat direalokasi jika dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan perbaikan mendesak.
3. Beban lalu lintas berat, over dimension over loading, di jalur Mahato–Manggala, jumlah truk berat meningkat hingga 1.000 unit per hari. Banyak truk tersebut membawa muatan melebihi kapasitas, yang menyebabkan kerusakan jalan dan kemacetan. Oleh karena itu, pembatasan muatan kendaraan sangat penting. Namun, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya alat berat dan pengawasan yang tidak memadai. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur jalan untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan kelancaran arus kendaraan.
4. Kualitas pembangunan, Pembangunan dan perbaikan kualitas jalan lintas provinsi di Kabupaten Okan Hulu masih kurang memadai. Warga setempat mengungkapkan keprihatinan atas kerusakan serius beberapa jalan, seperti di Rambah Hilir, Simpang Beringin, dan Desa Batas. Meskipun keluhan sudah disampaikan, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk memperbaiki kondisi tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang berharap perbaikan segera dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap teori evaluasi William dan Dunn mengenai kinerja Dinas PUPRKP Provinsi Riau, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu pada 2025, disimpulkan bahwa kinerja Dinas PUPRKP belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya jalan rusak, lambatnya respons terhadap masalah, dan kualitas jalan yang kurang memadai. Beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hulu, seperti Kota Bangun dan Desa Batang Kumu, mengalami kondisi jalan yang sangat buruk akibat faktor lalu lintas dan alam. Kondisi ini berulang, menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk di Jalan Lintas Tandun dan Jalan Lintas Ujung Batu. Data diperoleh dari artikel lokal, observasi, dan wawancara. Meskipun kinerja Dinas PUPRKP belum sepenuhnya efisien dan merata, ada kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya,

dengan peluncuran program baru dan perbaikan dalam menanggapi keluhan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan cukup tepat, meskipun pelaksanaannya masih tidak merata. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPRPKPP dapat meningkat dengan prioritas anggaran dan peningkatan kualitas pembangunan. Pengawasan proyek yang lebih intensif juga diperlukan agar kinerja Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. (2025). Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 6606-6617.
- Arikunto, S. (2016). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: bumi aksara.
- detik.com. (2025, Mei 29). *Dear Pak Gubernur! Jalan di Rohul Rusak, Semak Belukar Ganggu Jarak Pandang*. Diakses dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7939015/dear-pak-gubernur-jalan-di-rohul-rusak-semak-belukar-ganggu-jarak-pandang>
- Halloriar.com. (2025, Januari 30). *Banjir dan Jalan Rusak di Rohul Putuskan Arus Lalu Lintas*. Diakses dari <https://halloriar.com/m/read-14604052-2025-01-30-banjir-dan-jalan-rusak-di-rohul-putuskan-arus-lalu-lintas.html>
- Kartika, K. A. (2017). *Evaluasi Kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pembangunan Retaining Wall Pada Proyek Jembatan Sembayat Baru II Kabupaten Gresik*. Bandung: institut teknologi sepuluh november.
- Nugroho, B. (2022). Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Pedesaan di Riau. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2), 112-125.
- Pakar News Riau. (2025, Januari 27). *Warga Rokan Hulu Minta Pemprov.Riau Perbaiki Jalan Provinsi Rusak Parah*. Pakarnewsriau.com. <https://www.pakarnewsriau.com/2025/01/warga-rokan-hulu-minta-pemprovriau.html>
- Riauin.com. (2025, Mei 3). *Gubri Percepat Perbaikan Jalan Provinsi, Fokus di Rohil dan Rohul*. Diakses dari <https://www.riauin.com/read-45359-2025-05-03-gubri-percepat-perbaikan-jalan-provinsi-fokus-di-rohil-dan-rohul.html>
- Riau In. (2025, 28 Februari). *Jalan dan Jembatan Rusak Parah Akibat Banjir di Rokan Hulu, Bupati Anton Pantau dari Magelang*. Riau In. <https://www.riauin.com/read-44384-2025-02-28-jalan-dan-jembatan-rusak-parah-akibat-banjir-di-rokan-hulu-bupati-anton-pantau-dari-magelang.html>
- SpiritRiau.com. *Jalin Rokan- Danjar Datar Rusak Parah, PUPR Riau Jangan Pilih Kasih*. Diakses dari <https://www.spiritriau.com/Peristiwa/Jalin--Rokan--Danjar-Datar-Rusak-Parah--PUPR-Riau-Jangan-Pilih-Kasih->
- Yogia, M. A. (2018). *evaluasi menurut Yogja, Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)*. *administrasi publik*, 4(1), 74-97